

**PERAN UNITED NATIONS WOMEN (UN WOMEN) DALAM MENGATASI
GENDER-BASED VIOLENCE (GBV) DI INDIA: STUDI KASUS
PEREMPUAN KASTA DALIT TAHUN 2020-2021**

Oleh: Nur Afni Waljannah Zega

Pembimbing : Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study discusses the role of United Nations Women in addressing genderbased violence in India, with a specific focus on Dalit women during the 2020–2021 period. The background of this research is rooted in the high incidence of genderbased violence in India, driven by patriarchal norms and the caste system, resulting in Dalit women facing intersectional, double discrimination due to their gender and social status, which exacerbates their vulnerability to physical, sexual, and psychological violence

The research method is a qualitative case study with a deductive-descriptive approach. Data were collected by study library research, reviewing of books, journals, official reports, as well as UN Women’s documents and publications. The theoretical frameworks of constructivist and theory of international organizations as developed by Michael Barnett and Martha Finnemore, with the level of analysis focused on international organizations.

This research show that UN Women implemented various strategic programs in India, such as advocacy initiatives, and Gender Responsive Budgetin gwhich successfully raised public awareness, empowered women economically, strengthened gender-responsive policies, and built partnerships with civil society organizations. However, challenges such as limited funding, cultural barriers, and weak law enforcement against perpetrators of gender-based violence (GBV) remain to be addressed.

Keywords: *Gender-Based Violence, Dalit Caste, India, UN Women*

PENDAHULUAN

Gender-Based Violence (GBV) merupakan kekerasan yang timbul akibat ketimpangan gender, penyalahgunaan kekuasaan, dan norma sosial yang merugikan, di mana perempuan dan anak perempuan

menjadi kelompok paling rentan.¹ Di India, perempuan mengalami

¹ UN Women. 2020. “Types of violence against women and girls”. <https://africa.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence-1> [di akses pada 01 September 2024/]

diskriminasi dalam berbagai sektor akibat sistem patriarki dan tradisi keagamaan, diperburuk oleh sistem kasta yang membagi masyarakat secara hierarkis. Kelompok Dalit, sebagai kasta terendah, menghadapi diskriminasi ekstrem dan dianggap sebagai “*untouchable*”. Perempuan Dalit mengalami diskriminasi ganda berdasarkan gender dan kasta, menjadikan mereka sangat rentan terhadap kekerasan fisik, seksual, dan psikologis.²

Selama pandemi COVID-19, kekerasan terhadap perempuan Dalit meningkat drastis, menciptakan “*shadow pandemic*”.³ Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, India mencatat enam kasus kekerasan terhadap perempuan Dalit setiap jam, dan jumlahnya terus meningkat.⁴ Sistem kasta dan kemiskinan memperkuat eksploitasi sistematis terhadap perempuan Dalit, baik di dalam pekerjaan tidak manusiawi maupun praktik budaya yang menindas.⁵ Dari

penjelasan tersebut, di pahami bahwa perempuan kasta dalit mengalami interseksionalitas. Sebagaimana yang dikembangkan oleh Kimberlé Crenshaw untuk menjelaskan bagaimana berbagai bentuk penindasan seperti rasisme, seksisme, dan ketimpangan ekonomi saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, menciptakan pengalaman ketidakadilan yang unik dan berlapis bagi kelompok tertentu.⁶

UN Women dibentuk pada tahun 2010 sebagai respons terhadap lemahnya upaya PBB dalam menangani ketidaksetaraan gender. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wellis Wanti Sunardi yang berjudul “Upaya UN Women Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di India” membahas peran UN Women di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti melalui program *Second Chance Education* dan *Preventing Violence: Change Starts Now*.⁷ Penelitian ini menyoroti perlunya eksplorasi lebih lanjut terhadap peran UN Women dalam aspek ekonomi untuk mengatasi kekerasan berbasis gender pada perempuan Dalit, khususnya melalui program *Gender Responsive Budgeting* (GRB) dan mengadakan kerja sama dengan *All India Dalit Mahila Adhikar Manch* (AIDMAM). GRB merupakan strategi yang digunakan UN Women untuk

² Britannica. 2024. “socioeconomic challenges in India”. <https://www.britannica.com/topic/socioeconomic-challenges-in-India> [di akses pada 01 September 2024]

³ UN Women. 2021. “The Shadow Pandemic: Violence against women during COVID-19” <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19> [di akses pada 01 September 2024]

⁴ Nikhil Ramphal. 2022. “Madhya Pradesh & Rajasthan have highest crime rate against Dalits. Here’s why”. <https://theprint.in/india/madhya-pradesh-rajasthan-have-highest-crime-rate-against-dalits-heres-why/1110399/> [diakses pada 05 September 2024]

⁵ OHCHR. 2021. “Efforts to combat violence against women in Egypt: milestones, challenges, and recommendations”. <https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2021/06/efforts-combat-violence-against->

[women-egypt-milestones-challenges](#) [di akses pada 14 Mei 2025]

⁶ Kimberlé Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color.” *Stanford Law Review* 43, no. 6 (1991): 1241–1299

⁷ Welliswanti Sunardi. 2022. “Upaya UN Women (United Nations Women) dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di India”. *JOM FISIP*, Vol. 9: Edisi II Juli, Hal.2.

memastikan alokasi anggaran pemerintah memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan, termasuk perempuan Dalit, sebagai upaya struktural dalam mengatasi kekerasan berbasis gender secara berkelanjutan.

KERANGKA DASAR

A. Perspektif Konstruktivisme

Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme karena dapat membantu menjelaskan bagaimana UN Women, sebagai organisasi internasional, berperan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan Dalit di India. Konstruktivisme melihat bahwa hubungan antarnegara dan organisasi internasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh nilai, norma, dan cara berpikir yang terbentuk melalui interaksi sosial.⁸

Menurut Alexander Wendt, aturan dalam sistem internasional dibentuk dari kebiasaan dan nilai yang dibangun bersama. Karena itu, kekerasan terhadap perempuan Dalit tidak bisa hanya dianggap sebagai masalah hukum, tapi juga sebagai hasil dari budaya patriarki dan sistem kasta yang sudah dianggap biasa dalam masyarakat.⁹

UN Women tidak hanya menjalankan program, tetapi juga berusaha mengubah cara pandang dunia tentang kesetaraan gender, lewat kampanye, pendidikan, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Pendekatan

konstruktivisme membantu melihat bagaimana nilai-nilai baru tentang keadilan dan kesetaraan bisa menyebar dan diterima dalam masyarakat, untuk melindungi perempuan Dalit dan kelompok rentan lainnya secara lebih manusiawi.

B. Teori Organisasi Internasional

Penelitian ini menggunakan teori organisasi internasional dari Michael N. Barnett dan Martha Finnemore dalam karyanya berjudul *"The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations"*. Dalam penelitian ini, pendekatan konstruktivisme dari Michael Barnett dan Martha Finnemore digunakan untuk memahami peran UN Women dalam mengatasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan Dalit di India. Teori ini melihat bahwa organisasi internasional seperti UN Women bukan hanya alat negara, tapi bisa menjadi aktor yang mandiri dan berpengaruh, karena memiliki kewenangan moral dan keahlian teknis yang diakui secara internasional.¹⁰ Barnett dan Finnemore menjelaskan bahwa organisasi internasional memiliki kekuatan untuk menciptakan norma sosial, menentukan makna suatu isu, dan mengklasifikasikan siapa yang dianggap sebagai aktor penting atau kelompok rentan. Dengan kata lain, mereka bisa membentuk cara dunia memandang suatu masalah.

Lebih lanjut, Barnett dan Finnemore juga menyebutkan bahwa kekuasaan OI bersumber dari otoritas rasional-legal, yang merujuk pada

⁸ Alexander Wendt, "Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics" International Organization 46, no. 2 (Spring 1992): 396

⁹ Ibid., hal 396.

¹⁰ Michael N. Barnett dan Martha Finnemore, *The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations*, International Organization 53, no. 4 (Autumn 1999): 699–701.

konsep birokrasi modern ala Max Weber. Artinya, OI dianggap berwenang karena mereka memiliki sistem administrasi yang profesional, netral, dan dijalankan oleh keahlian teknis yang diakui. Justru karena hal ini, OI sering kali dilihat sebagai pihak yang sah dan kredibel dalam menetapkan standar internasional.¹¹

Dalam konteks ini, UN Women tidak hanya membantu secara teknis, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang masyarakat dan pemerintah terhadap kekerasan berbasis gender. Mereka memperkenalkan nilai-nilai global tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia, lalu berusaha agar nilai-nilai ini diterapkan di tingkat lokal termasuk untuk melindungi perempuan dari kasta Dalit yang mengalami diskriminasi ganda, baik karena gender maupun kasta. Pendekatan ini membantu menjelaskan bahwa tindakan UN Women tidak hanya soal program, tetapi juga upaya membentuk norma dan kesadaran baru tentang hak dan perlindungan perempuan

C. Level Analysis

Penelitian ini menggunakan tingkat analisis kelompok, yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional dipahami sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara aktor negara dan non-negara dari dua atau lebih negara berdaulat, dengan tujuan mencapai kepentingan bersama.¹² Contoh dari organisasi internasional antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), NATO, IMF,

Greenpeace, serta berbagai NGO dan INGO.

Awalnya, negara dianggap sebagai satu-satunya aktor yang memiliki kekuasaan dalam urusan politik global, khususnya di bidang militer dan ekonomi. Namun, sejak berakhirnya Perang Dunia II dan berdirinya PBB pada 1945, paradigma ini mulai berubah. Munculnya aktor non-negara seperti organisasi internasional menunjukkan bahwa mereka juga memiliki pengaruh besar dalam menangani berbagai persoalan global, seperti krisis ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, ketimpangan pembangunan, dan kerusakan lingkungan. Karena itu, organisasi internasional kini dipandang sebagai aktor penting dalam tatanan dunia modern.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, studi kasus bertujuan untuk mengeksplorasi suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber.¹³ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif deduktif, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial secara menyeluruh melalui pengolahan data teks dan gambar.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode *library research*, yaitu pengumpulan data melalui kajian literatur. Data diperoleh

¹¹ Ibid., Hal 708

¹² Clive Archer. *International Organizations*, Third Editions. (London: Routledge, 2001)

¹³ Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Amerika Serikat: SAGE Publications.

¹⁴ Ibid.

dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan resmi, situs web, dan penelitian terdahulu, yang kemudian dianalisis secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. UN Women di India

Perubahan kelembagaan penting dalam penanganan isu gender di PBB terjadi pada Juli 2010 melalui pembentukan UN Women (*The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*). Lembaga ini mengintegrasikan empat badan PBB sebelumnya yaitu DAW, OSAGI, INSTRAW, dan UNIFEM, guna memperkuat efektivitas PBB dalam mendorong kesetaraan gender.¹⁵

Sejak 2011, UN Women menjadi sekretariat utama Komisi Status Perempuan, dengan peran dalam penyusunan laporan, analisis kebijakan, serta mendukung partisipasi masyarakat sipil. UN Women berfokus pada penguatan norma dan kebijaksanaan global terkait kesetaraan gender, yang dianggap sebagai bagian integral dari HAM, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun telah dicapai kemajuan melalui instrumen internasional seperti CEDAW dan *Beijing Declaration*, perempuan di berbagai belahan dunia masih menghadapi diskriminasi, kekerasan, ketimpangan upah, serta keterbatasan

akses terhadap pendidikan dan layanan dasar.

Pembentukan UN Women juga merupakan respons atas tantangan pendanaan dan koordinasi dalam sistem PBB sebelumnya. Di India, UN Women mulai beroperasi pada 2011 melalui kantor regional di New Delhi sebagai bagian dari *South Asia Multi-Country Office*. Kehadiran ini merupakan hasil kerja sama dengan pemerintah India, yang telah meratifikasi CEDAW dan berkomitmen pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama SDGs Tujuan 5.

UN Women bekerja sama dengan lembaga pemerintah seperti *Ministry of Women and Child Development*, *National Commission for Women*, serta organisasi masyarakat sipil. Program yang dijalankan mencakup pelatihan kapasitas, dukungan kebijakan, bantuan teknis, dan pendanaan, termasuk untuk pemberdayaan perempuan dari kelompok rentan seperti perempuan Dalit, dalam upaya mengatasi kekerasan berbasis gender (GBV).

2. Gender-Based Violence di India

Gender-based violence (GBV) di India merupakan masalah yang kompleks dan sudah berlangsung lama, berakar pada norma patriarki, ketidaksetaraan gender, serta diskriminasi sosial dan ekonomi. Bentuk kekerasannya mencakup kekerasan domestik, pelecehan seksual, pernikahan dini dan paksa, serta kekerasan terkait mas kawin. Perempuan, terutama dari komunitas terpinggirkan seperti Dalit, menjadi kelompok yang paling rentan.

¹⁵ UN Women, "In Historic Move, UN Creates Single Entity to Promote Women's Empowerment" UN Women, <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2010/7/in-historic-move-un-creates-single-entity-to-promote-womens-empowerment> [di akses pada 08 September 2024]

Dampaknya tidak hanya fisik dan mental, tetapi juga membatasi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak dasar lainnya.

Data dari *National Crime Records Bureau* menunjukkan bahwa kejahatan terhadap perempuan di India termasuk perempuan Dalit, terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah India telah meluncurkan sejumlah program pada 2021, seperti *Women Helpline*, *One Stop Centre*, dan *Mahila Police Volunteer*, untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan.¹⁶ Namun, pelaksanaan program-program ini masih menghadapi tantangan, khususnya dalam hal alokasi anggaran.¹⁷ Tren pada 2020–2021 menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan.

Tabel 2. 1 Jumlah Kejahatan yang Terjadi di India tahun 2019-2021

NO	Tahun	Jumlah
1	2019	405.861
2	2020	371.503
3	2021	428.278

Sumber: *National Crimes Bureau 2022*

Berdasarkan data *National Crimes Records Bureau* (NCRB), pada 2019 tercatat 405.861 kasus kejahatan terhadap perempuan di India, dengan jenis kekerasan terbanyak berupa

kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, penculikan, kekerasan seksual, dan pemerkosaan. Jumlah ini menurun menjadi 371.503 kasus pada 2020, namun kembali meningkat menjadi 428.278 kasus pada 2021.¹⁸ Penurunan pada 2020 lebih disebabkan oleh keterbatasan pelaporan selama pandemi COVID-19, bukan karena berkurangnya kekerasan.¹⁹

Selama *lockdown* nasional India mulai Maret 2020, korban kekerasan, terutama KDRT, mengalami kesulitan melapor karena terbatasnya akses ke layanan seperti polisi, rumah sakit, dan bantuan hukum, serta karena harus tinggal serumah dengan pelaku tanpa privasi.²⁰ Pada 2021, setelah pembatasan dilonggarkan dan layanan publik dibuka kembali, laporan kasus GBV meningkat tajam. Kenaikan ini mencerminkan pemulihan akses pelaporan, termasuk laporan kasus yang tertunda dari tahun sebelumnya.²¹

Adapun jumlah kasus GBV di India yang paling banyak terjadi di wilayah negara bagian sebagai berikut:

¹⁸ National Crime Bureau.2023. "Crime in India 2022".
<https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1701607577CrimeinIndia2022Book1.pdf>

¹⁹ Dheannaz Tirtoputri. "Pandemi COVID-19 dan Peningkatan Kasus Kekerasan Gender di India." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 (1) (2022).

²⁰ Dheannaz Tirtoputri. "Pandemi COVID-19 dan Peningkatan Kasus Kekerasan Gender di India." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 (1) (2022).

²¹ UN Women. 2021. "Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19" <https://data.unwomen.org/publications/vaw-rga> [di akses pada 16 Maret 2025]

Tabel 3. 2 Wilayah Negara Bagian India Dengan GBV Terbanyak 2020-2021²²

NO	Wilayah Negara Bagian	2020	2021
1	Uttar Pradesh	49.385	56.083
2	Rajashtan	34.535	40.738
3	Maharashtra	31.954	39.526
4	Assam	26.352	29.046
5	West Bengal	36.439	35.884

Sumber: *National Crime Bureau* 2022

Data menunjukkan bahwa beberapa negara bagian di India mencatat jumlah kasus GBV tertinggi. Uttar Pradesh mencatat peningkatan dari 49.385 kasus pada 2020 menjadi 56.083 kasus pada 2021 naik sebanyak 13,54%. Rajasthan naik 17,96% menjadi 40.738 kasus, dan Maharashtra mengalami lonjakan tertinggi sebesar 23,69% menjadi 39.526 kasus, lalu meningkat lagi menjadi 45.331 kasus pada 2022. Assam mencatat kenaikan 10,21%, sementara West Bengal justru mengalami penurunan kasus.²³ Secara nasional, pasca pandemi, kasus kekerasan terhadap perempuan kembali meningkat, dari 428.278 kasus pada 2021 menjadi 445.256 kasus pada 2022. Kekerasan yang paling umum masih didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan

²² National Crime Bureau.2023. "Crime in India 2022".

<https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbur/eau/custom/1701607577CrimeinIndia2022Book1.pdf>

²³ National Crime Bureau, 2021. "Crime in India 2021: Statiscs Government of India. <https://ruralindiaonline.org/hi/library/resource/crime-in-india-2020-volume-i/> [di akses pada 16 Maret 2025]

seksual, dan penculikan disertai kekerasan.²⁴

Terdapat beberapa kasus GBV yang terjadi di India pada tahun 2020-2021. Berikut tabel yang dapat di lampirkan

Tabel 3. 3 Bentuk *Gender-based violence* di India

N O	Puncak Kasus	Jumlah Kasus	
		2020	2021
1	Kejahatan Oleh Suami atau Kerabat	111.549	136.234
2	Penyerangan terhadap Perempuan dengan Maksud Melecehkan	85.392	89.200
3	Penculikan dan Penyekapan	84.805	101.707
4	Pemeriksaan	28.046	31.677
5	Kekerasan Seksual	17.003	17.539

Sumber: *National Crimes Record Bureau* 2022

Dari tabel tersebut, dapat di ketahui bahwa pada tahun 2021, tercatat 428.278 kasus kejahatan terhadap perempuan di India, meningkat 15,3% dari 371.503 kasus pada 2020. Seluruh kategori kekerasan berbasis gender (GBV) menunjukkan peningkatan. Kekerasan oleh suami atau kerabat naik signifikan dari 111.549 menjadi 136.234 kasus, menunjukkan bahwa KDRT tetap menjadi masalah utama. Kasus penculikan dan penyekapan

²⁴ Ruben Poblete Cazenave, "The Impact of Lockdowns on Crime and Violence Against Women – Evidence From India," Social Science Research Network, 2020

meningkat dari 84.805 menjadi 101.707, serta pelecehan dari 85.392 menjadi 89.200 kasus. Kasus pemerkosaan juga naik dari 28.046 menjadi 31.677, sementara kekerasan seksual lainnya meningkat sedikit menjadi 17.539 kasus.²⁵

Di tengah pandemi COVID-19, kerentanan perempuan memburuk. Sebagai respons, pemerintah India menetapkan layanan perlindungan seperti *shelter* dan *One-Stop Crisis Centers* (OSC) sebagai layanan esensial yang tetap beroperasi selama lockdown. OSC memberikan layanan medis, psikologis, dan hukum, dengan lebih dari 700 pusat aktif membantu ratusan ribu perempuan, termasuk dari kelompok Dalit yang sangat rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan.²⁶

Pemerintah India memanfaatkan *Nirbhaya Fund* untuk memperkuat perlindungan perempuan melalui pengembangan *One-Stop Crisis Centers* (OSC), kendaraan patroli, pemasangan CCTV, dan pelatihan aparat. Namun, pemanfaatan dana ini masih belum optimal, dengan sebagian besar wilayah tidak menggunakan anggaran secara maksimal.²⁷ Selama lockdown, lonjakan kasus kekerasan mendorong *National Commission for Women* (NCW) membuka saluran pengaduan digital seperti WhatsApp dan hotline

181.²⁸ Dalam Maret–April 2020, pengaduan KDRT naik 45%. NCW juga menggalakkan kampanye kesadaran seperti *#SuppressTheSilence*.²⁹

Pemerintah India memperkuat kerja sama dengan UN Women dan organisasi sipil dalam kampanye, pelatihan, dan pendampingan hukum. UN Women membantu menyediakan data, menyusun modul pelatihan, serta mendukung program *Safe Cities* untuk ruang publik yang aman bagi perempuan. Perempuan Dalit dilindungi melalui *Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act*, yang diperkuat dengan unit perlindungan khusus, pelatihan aparat, pemetaan wilayah rawan, dan bantuan hukum gratis. Namun, pelaksanaan masih terkendala diskriminasi sosial, keterbatasan dana, dan sumber daya.³⁰

3. Gender-Based Violence pada Kasta Dalit

Meskipun sistem kasta secara resmi dihapuskan melalui Konstitusi India pada tahun 1950, struktur sosial yang telah mengakar selama lebih dari 2.000 tahun masih tetap berpengaruh

²⁵ National Crime Bureau, 2022. "Crime in India 2022: Statistics Government of India. <https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1701607577CrimeinIndia2022Book1.pdf> [di akses pada 16 Maret 2025]

²⁶ UN Women Asia-Pacific. Annual Report 2020-2021.

²⁷ Feminism in India, "How Has the Indian Government Dealt With Domestic Violence Post COVID-19?" <https://feminisminindia.com> [di akses pada 29 Juni 2025]

²⁸ Times of India, NCW Launches Whatsapp Number To Report Domestic Violence During Lockdown.

<https://timesofindia.indiatimes.com/india/ncw-launches-whatsapp-number-to-report-domestic-violence-during-lockdown/articleshow/75082561.cms> [di akses pada 29 Juni 2025]

²⁹ National Commission for Women, Annual Report 2020–21. hlm 2

³⁰ Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. "The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989." <https://socialjustice.gov.in/writereaddata> [di akses 29 Juni 2025]

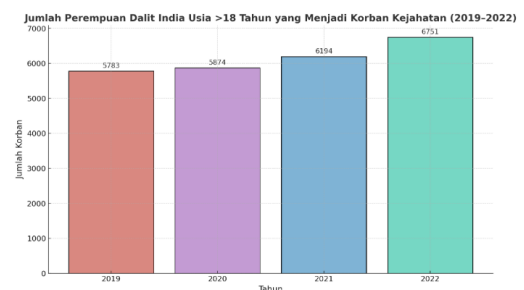
dalam kehidupan masyarakat.³¹ Sistem ini, dikenal sebagai *jati*, mengelompokkan individu sejak lahir berdasarkan garis keturunan, yang menentukan pekerjaan, relasi sosial, hingga pasangan pernikahan.³² Dalam sistem kasta Hindu, Dalit berada di luar hierarki empat kasta utama (Brahmana, Kshatriya, Vaishya, dan Shudra) dan secara historis disebut sebagai “*untouchables*”, menjadikan mereka kelompok yang paling terpinggirkan.³³

Perempuan Dalit menghadapi diskriminasi ganda akibat identitas mereka sebagai perempuan dan sebagai anggota kasta terendah. Berbeda dari perempuan non-Dalit, mereka mengalami pengucilan sosial serta ketundukan pada sistem patriarki yang diperkuat oleh dominasi kasta atas. Akibatnya, mereka menjadi sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, dengan tingkat keadilan yang sangat rendah.³⁴ Penelitian menunjukkan bahwa tingkat hukuman terhadap pelaku pemerkosaan perempuan Dalit

kurang dari 2%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 25%.³⁵

Aparat penegak hukum sering kali tidak responsif terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan Dalit. Banyak laporan diabaikan atau ditolak, sementara sistem peradilan gagal memberikan perlindungan yang memadai. Selain itu, diskriminasi berbasis kasta dan gender juga terjadi dalam layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang mereka alami.³⁶

Tabel 3. 4 Jumlah Korban Kejahatan pada Kasta Dalit India



Sumber: *National Crime Bureau*

Data dari *National Crime Records Bureau* (NCRB) menunjukkan peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan Dalit dari tahun ke tahun. Pada 2019 tercatat 5.783 kasus, meningkat menjadi 5.874 pada 2020, 6.194 kasus pada 2021, dan mencapai 6.751 kasus pada 2022. Jenis kekerasan yang paling dominan meliputi penghinaan berbasis kasta dan pelecehan seksual. Namun, banyak dari kasus ini tidak dilaporkan secara

³¹ CNN.2020. “Under India’s caste system, Dalits are considered untouchable. The coronavirus is intensifying that slur”. <https://edition.cnn.com/2020/04/15/asia/india-coronavirus-lower-castes-hnk-intl/index.html> [di akses pada 16 Maret 2025]

³² Asia Society. 2020. “Jati: The Caste System in India” <https://asiasociety.org/education/jati-caste-system-india> [di akses pada 16 Maret 2025]

³³ Rusdiana. 2022. “Dalit, Kasta yang Haram Disentuh dalam Stratifikasi Masyarakat India”. <https://www.solopos.com/dalit-kasta-yang-haram-disentuh-dalam-stratifikasi-masyarakat-india-1244900>. [di akses pada 16 Maret 2025]

³⁴ Priyadarsini, Nibedita dan Satya Swaroop Panda. 2023. “Caste Patriarchy and the Dehumanization of Dalit Women in Indian Society: Phoolle–Ambedkarite Perspective”. *Contemporary Voice of Dalit*, 15(1) 61–74. DOI 10.1177/2455328X211039324

³⁵ IDSN. 2024. “Dalit Women”. <https://idsn.org/key-issues/dalit-women/> [di akses pada 19 Maret 2025]

³⁶ Ibid.

resmi dan sering diselesaikan melalui kekeluargaan tanpa proses hukum.³⁷

Secara keseluruhan, perempuan kaum Dalit, tetap menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan berbasis kasta. Laporan NCRB tahun 2022 mencatat 57.582 kasus kejahatan terhadap komunitas *Scheduled Castes* (SC), meningkat 13,1% dari tahun sebelumnya. Rasio kejahatan terhadap kelompok ini juga naik dari 25,3 menjadi 28,6 per 100.000 penduduk, menandakan masih kuatnya kekerasan dan diskriminasi sistemik yang mereka hadapi dalam masyarakat India.³⁸

4. Kondisi Perempuan Kasta Dalit pada Masa COVID-19

Pandemi COVID-19 memberikan dampak luas bagi masyarakat India, namun perempuan dari kasta Dalit mengalami kerentanan yang jauh lebih kompleks akibat adanya diskriminasi berlapis yang bersumber dari identitas gender, kasta, dan kelas sosial. Selama masa *lockdown*, perempuan Dalit menghadapi peningkatan signifikan dalam kekerasan berbasis gender (GBV), baik di ranah domestik karena terjebak bersama pelaku, maupun di ruang publik akibat terbatasnya akses terhadap layanan dukungan dan keadilan. Stigma sosial dan diskriminasi yang mengakar turut menjadi penghambat dalam pelaporan dan penanganan kasus kekerasan.

³⁷ Smita M. Patil, "Gender Equity and COVID-19: Dalit Standpoints," *Economic and Political Weekly*".

³⁸ The News Minute. 2022."NCRB data shows increase in crimes against SCs and STs, UP and Rajasthan on top".<https://www.thenewsminute.com/news/ncrb-data-shows-increase-in-crimes-against-scs-and-sts-up-and-rajasthan-on-top> [di akses pada 20 Maret 2025]

Akses terhadap layanan kesehatan bagi perempuan Dalit, terutama di wilayah pedesaan, sangat terbatas. Faktor seperti minimnya fasilitas, ketiadaan dokumen identitas resmi, serta diskriminasi sistemik di institusi kesehatan menyebabkan mereka menjadi kelompok yang paling terpinggirkan dalam mendapatkan layanan medis selama pandemi.³⁹ Data menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan Dalit terus meningkat, yakni sebanyak 50.291 kasus pada tahun 2020, naik menjadi 50.900 pada 2021, dan kembali meningkat menjadi 57.582 kasus pada 2022.⁴⁰ Bentuk kekerasan yang paling sering dialami adalah penghinaan berbasis kasta dan pelecehan seksual, yang mengindikasikan masih kuatnya struktur sosial yang bersifat dominatif dan patriarkal.⁴¹

Pandemi juga memperkuat praktik diskriminasi berbasis kasta. Konsep *social distancing* yang awalnya bersifat medis secara tidak langsung melegitimasi kembali praktik pengucilan sosial terhadap kelompok Dalit. Beberapa laporan bahkan menunjukkan adanya penolakan terhadap makanan yang disiapkan oleh perempuan Dalit di pusat-pusat

³⁹ Think Global Health. "India's unjust health-care system".

<https://www.thinkglobalhealth.org/article/caste-out> [di akses pada 29 Juni 2025]

⁴⁰ National Crime Records Bureau, "Crime in India 2022 Volume II" (New Delhi, 2022), <https://ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1701608364CrimeinIndia2022Book2.pdf>. hlm 541

⁴¹ Anuradha Nagaraj, "India's Low-Caste Women Raped to Keep Them 'in Their Place,'" Thomson Reuters Foundation, 2020, <https://news.trust.org/item/20201125013415-sqvxe> [di akses pada 29 Juni 2025]

karantina. Sementara itu, kondisi tempat tinggal yang padat, minim fasilitas dasar, serta tekanan ekonomi di sektor informal semakin memperburuk situasi perempuan Dalit selama krisis kesehatan ini.⁴²

Secara ekonomi, perempuan Dalit menghadapi ketimpangan struktural yang mendalam. Meskipun pemerintah India telah menginisiasi program seperti *National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC)* dan *Venture Capital Fund for Scheduled Castes* untuk mendukung pelatihan dan kewirausahaan komunitas Dalit, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tetap rendah.⁴³ Menurut data *World Bank*, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menurun dari 31,7% pada 2005 menjadi hanya 20,1% pada 2020, jauh di bawah partisipasi laki-laki yang empat kali lebih tinggi dalam periode yang sama.⁴⁴

UN Women turut berperan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan terdampak, termasuk perempuan Dalit, melalui pemberian bantuan tunai langsung dan pelaksanaan *Gender Responsive Budgeting (GRB)*. Pada akhir 2021, bantuan tunai disalurkan kepada ribuan perempuan dari kelompok rentan, termasuk pengusaha mikro, untuk memenuhi kebutuhan dasar serta

memulihkan kegiatan ekonomi mereka.⁴⁵

5. UN Women dan Penanganan GBV di India

Dalam menganalisis peran UN Women sebagai aktor internasional dalam penanganan kekerasan berbasis gender (GBV) terhadap perempuan Dalit di India, teori Organisasi Internasional (OI) yang dikembangkan oleh Michael Barnett dan Martha Finnemore menjadi salah satu kerangka teoritis yang paling relevan. Dalam karya mereka yang berjudul *“The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations”*, Barnett dan Finnemore menyatakan bahwa organisasi internasional tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan atau alat negara, melainkan sebagai aktor otonom yang memiliki kekuasaan normatif, sosial, dan birokratik.⁴⁶ UN Women, sebagai lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, telah menunjukkan peran aktifnya sebagai aktor internasional melalui berbagai program global, seperti melakukan kerjasama dengan AIDMAM dan program *Gender Responsive Budgeting*.

Pada tahun 2020–2021, UN Women memperkuat dukungannya terhadap organisasi perempuan Dalit melalui kerja sama dengan *All India*

⁴² Sandip Mondal dan Ranjan Karmakar. 2024. “Caste in the Time of the COVID-19 Pandemic”. *Contemporary Voice of Dalit*, 16(1), hlm 114

⁴³ Ministry of Social Justice and Empowerment. 2023. “National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC)”.

⁴⁴ The World Bank. 2023. “Labor Force Participation Rate, Female (% of Female Population Ages 15+) (Modeled ILO Estimate) - India,” The World Bank. <https://data.worldbank.org/indicator/>

⁴⁵ UN Women.2023. “What is gender-responsive budgeting?” https://www.unwomen.org/en/news_stories/explainer/2023/11/what-is-gender-responsive-budgeting [di akses pada 22 April 2025]

⁴⁶ Michael N. Barnett dan Martha Finnemore, *The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations*, International Organization 53, no. 4 (Autumn 1999): hlm 710

Dalit Mahila Adhikar Manch (AIDMAM), bagian dari *National Campaign on Dalit Human Rights* (NCDHR). Kolaborasi ini difokuskan pada penanganan kekerasan berbasis kasta dan gender, serta peningkatan akses terhadap keadilan dan dukungan sosial bagi perempuan Dalit.

Sebagai bagian dari strategi global, UN Women memberikan dukungan teknis dan diplomatik kepada AIDMAM, termasuk dalam penyusunan *Status Report 2021: Dalit Women Rise for Justice* yang memantau kasus kekerasan di enam negara bagian. Selain itu, UN Women juga mendukung berbagai kegiatan seperti konsultasi wilayah di Madhya Pradesh dan Bihar, serta konferensi pengacara Dalit di Patna, untuk memperkuat kapasitas advokasi perempuan Dalit.⁴⁷

Di bidang kepemimpinan, UN Women turut mendukung pelatihan bagi lebih dari 400 pemimpin muda Dalit melalui program AIDMAM yang mencakup pemantauan HAM, pemahaman hukum *Prevention of Atrocities Act*, dan advokasi kebijakan lokal. Pembentukan jaringan komunitas ini memungkinkan identifikasi kebutuhan perempuan Dalit secara lebih langsung dan berkelanjutan.⁴⁸

⁴⁷ All India Dalit Mahila Adhikar Manch, *Dalit Women Rise for Justice: Status Report 2021* (New Delhi: AIDMAM-NCDHR, 2021). <https://wagtail.ruralindiaonline.org/en/library/resource/dalit-women-rise-for-justice-status-report-2021/> [di akses pada 29 Juni 2025]

⁴⁸ International Dalit Solidarity Network. "New Report: Dalit Women Rise for Justice". <https://idsn.org/new-report-dalit-women-rise-for-justice-status-report-2021-released-by-aidmam-ncdhr/dalit-women-rise-for-justice-report-cover-2021/> [di akses pada 29 Juni 2025]

Gender Responsive Budgeting (GRB) merupakan pendekatan strategis yang digunakan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan dan perencanaan anggaran publik. Metode ini tidak hanya mencakup alokasi anggaran, tetapi juga analisis dampak sosial-ekonomi terhadap perempuan. Di India, UN Women secara aktif mendorong penerapan GRB dengan memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan agar dapat merancang kebijakan yang berpihak pada perempuan.

Sejak tahun 2005, India menjadi salah satu negara pelopor dalam penerapan GRB, dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (MWCD). UN Women bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun anggaran yang inklusif, terutama di sektor pertanian, pembangunan desa, dan perkotaan yang merupakan sektor penting bagi perempuan Dalit. Melalui GRB, pemerintah menunjukkan komitmen untuk mencapai kesetaraan gender melalui alokasi sumber daya yang adil dan tepat sasaran.⁴⁹

UN Women, melalui program *Gender Responsive Budgeting* (GRB), secara aktif mendukung pemenuhan kebutuhan perempuan dari komunitas terpinggirkan, termasuk perempuan Dalit. Dukungan ini diberikan dengan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik

⁴⁹ UN Women Asia and The Pacific. "Gender Budgeting Responsive". <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/india/national-planning-and-budgeting/2/gender-responsive-budgeting> [di akses pada 09 Mei 2025]

mereka serta memastikan alokasi anggaran diarahkan pada program strategis seperti perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja.⁵⁰

Selama periode 2020–2021, UN Women India memperkuat implementasi GRB dengan memberikan bantuan teknis di empat negara bagian yaitu Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, dan Manipur. Hasilnya mencakup pembentukan Sel Anggaran Gender, penyusunan Surat Edaran Anggaran, dan penerbitan Pernyataan Anggaran Gender sebagai bagian dari kebijakan fiskal negara. Selain itu, dirancang Rencana Aksi GRB jangka menengah, kajian sektoral, modul pelatihan, serta praktik-praktik terbaik.

Sejak menerapkan penganggaran responsif gender pada 2007–2008, Madhya Pradesh secara konsisten menerbitkan Pernyataan Anggaran Gender setiap tahun. Dengan dukungan UN Women, pada 2021 negara bagian ini berkomitmen menjadikan kawasan wisata lebih aman dan ramah bagi perempuan dan anak perempuan. Program “Keselamatan Perempuan di Tempat Wisata” yang tercantum dalam Pernyataan Anggaran Gender 2020–2022 juga bertujuan membuka lebih banyak peluang kerja bagi perempuan di sektor pariwisata.⁵¹

UN Women juga menginisiasi pelatihan dan program pertukaran pembelajaran antarwilayah. Sejumlah negara bagian menunjukkan kemajuan signifikan, seperti Madhya Pradesh yang mewajibkan alokasi 10% anggaran rencana negara untuk

program khusus perempuan, serta Kerala yang meningkatkan anggaran gender dari 11,4% pada tahun 2017–2018 menjadi 20,9% di tahun 2020–2022. Capaian ini menunjukkan efektivitas GRB dalam meningkatkan akuntabilitas dan hasil nyata bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.⁵²

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa UN Women tidak hanya menjalankan peran teknis, tetapi juga berfungsi sebagai aktor internasional dengan kapasitas normatif, sosial, dan birokratis, sebagaimana dijelaskan oleh teori organisasi internasional Barnett dan Finnemore. Hal ini terlihat dari keterlibatannya dalam berbagai program yang menargetkan perempuan dari kelompok terpinggirkan, khususnya perempuan Dalit di India.

Pada 2020–2021, UN Women memperkuat kolaborasi dengan organisasi lokal seperti AIDMAM dan NCDHR untuk memberikan pendampingan hukum, pelatihan, dan advokasi. Melalui kemitraan ini, isu kekerasan berbasis kasta dan gender diangkat ke tingkat internasional. Selain itu, UN Women mendorong penerapan *Gender Responsive Budgeting* (GRB) untuk memastikan anggaran pemerintah responsif terhadap kebutuhan perempuan, termasuk dari komunitas Dalit. Contohnya di Madhya Pradesh dan Kerala, GRB berhasil mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

Dengan demikian, UN Women menunjukkan kemampuannya sebagai aktor global yang mampu menyesuaikan program internasional ke dalam konteks lokal, sekaligus membentuk pemahaman baru tentang keadilan sosial dan kesetaraan gender bagi kelompok rentan di India.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Wendt, "Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics" International Organization 46, no. 2 (Spring 1992): 396
- All India Dalit Mahila Adhikar Manch, *Dalit Women Rise for Justice: Status Report 2021* (New Delhi: AIDMAM NCDHR, 2021). <https://wagtail.ruralindiaonline.org/en/library/resource/dalit-women-rise-for-justice-status-report-2021/> [di akses pada 29 Juni 2025]
- Anuradha Nagaraj, "India's Low-Caste Women Raped to Keep Them 'in Their Place'" Thomson Reuters Foundation, 2020, <https://news.trust.org/item/20201125013415-sqvxe> [di akses pada 29 Juni 2025]
- Asia Society. 2020. "Jati: The Caste System in India" <https://asiasociety.org/education/jati-caste-system-india> [di akses pada 16 Maret 2025]
- Britannica. 2024. "socioeconomic challenges in India". <https://www.britannica.com/topic/socioeconomic-challenges-in-India> [di akses pada 01 September 2024]
- Clive Archer. International Organizations, Third Editions. (London: Routledge, 2001)
- CNN.2020. "Under India's caste system, Dalits are considered untouchable. The coronavirus is intensifying that slur". <https://edition.cnn.com/2020/04/15/asia/india-coronavirus-lower-castes-hnk-intl/index.html> [di akses pada 16 Maret 2025]
- Creswell, John W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Amerika Serikat: SAGE Publications.
- Dheannaz Tirtoputri. "Pandemi COVID-19 dan Peningkatan Kasus Kekerasan Gender di India." Jurnal Pendidikan Tambusai, 6 (1) (2022).
- Feminism in India, "How Has the Indian Government Dealt With Domestic Violence Post COVID-19?" <https://feminisminindia.com> [di akses pada 29 Juni 2025]
- IDSN. 2024. "Dalit Women". <https://idsn.org/key-issues/dalit-women/> [di akses pada 19 Maret 2025].
- International Dalit Solidarity Network. "New Report: Dalit Women Rise for Justice". <https://idsn.org/new-report-dalit-women-rise-for-justice-status-report-2021-released-by-aidmam-ncdhr/dalit-women-rise-for-justice-report-cover-2021/> [di akses pada 29 Juni 2025]
- Kimberlé rensshaw, "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color." Stanford Law Review 43, no. 6 (1991): 1241–1299

- Mampi Bose, "What Government Expenditure Tells Us About Official Attitudes Towards Women's Safety," *The Wire*, 2023, <https://thewire.in/women/what-government-expenditure-tellsus-about-official-attitudes-towardswomens-safety> [di akses pada 17 April 2025]
- Michael N. Barnett dan Martha Finnemore, *The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations*, International Organization 53, no. 4 (Autumn 1999)
- Michael N. Barnett dan Martha Finnemore, *The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations*, International Organization 53, no. 4 (Autumn 1999)
- Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. "The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989." <https://socialjustice.gov.in/writer-eaddata> [di akses 29 Juni 2025]
- Ministry of Social Justice and Empowerment. 2023. "National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC)".
- Ministry of Women and Child Development, "Mission Shakti Guidelines" (New Delhi, 2022).
- National Commission for Women, Annual Report 2020–21.
- National Crime Bureau, 2022. "Crime in India 2022: Statistics Government of India. <https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1701607577CrimeinIndia2022Book1.pdf> [di akses pada 16 Maret 2025]
- National Crime Bureau.2023. "Crime in India 2022". <https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1701607577CrimeinIndia2022Book1.pdf>
- National Crime Records Bureau, "Crime in India 2022 Volume II" (New Delhi, 2022), <https://ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1701608364CrimeinIndia2022Book2.pdf>.
- Nikhil Ramphal.2022." Madhya Pradesh & Rajasthan have highest crime rate against Dalits. Here's why". <https://theprint.in/india/madhya-pradesh-rajasthan-have-highest-crime-rate-against-dalits-heres-why/1110399/> [diakses pada 05 September 2024]
- OHCHR. 2021. "Efforts to combat violence against women in Egypt: milestones, challenges, and recommendations". <https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2021/06/efforts-combat-violence-against-women-egypt-milestones-challenges> [di akses pada 14 Mei 2025]
- Priyadarsini, Nibedita dan Satya Swaroop Panda. 2023. "Caste Patriarchy and the Dehumanization of Dalit Women in Indian Society: Phoolle–Ambedkarite Perspective". *Contemporary Voice of Dalit*,

- 15(1) 61–74. DOI 10.1177/2455328X211039324
- Ruben Poblete Cazenave, “The Impact of Lockdowns on Crime and Violence Against Women – Evidence From India,” Social Science Research Network, 2020
- Rusdiana. 2022. “Dalit, Kasta yang Haram Disentuh dalam Stratifikasi Masyarakat India”. <https://www.solopos.com/dalit-kasta-yang-haram-disentuh-dalam-stratifikasi-masyarakat-india-1244900>. [di akses pada 16 Maret 2025]
- Sandip Mondal dan Ranjan Karmakar. 2024. “Caste in the Time of the COVID-19 Pandemic”. Contemporary Voice of Dalit, 16(1).
- Smita M. Patil, “Gender Equity and COVID-19: Dalit Standpoints,” Economic and Political Weekly”.
- The News Minute. 2022.”NCRB data shows increase in crimes against SCs and STs, UP and Rajasthan on top”.<https://www.thenewsminute.com/news/ncrb-data-shows-increase-in-crimes-against-scs-and-sts-up-andrajasthan-on-top> [di akses pada 20 Maret 2025]
- The World Bank. 2023. “Labor Force Participation Rate, Female (% of Female Population Ages 15+) (Modeled ILO Estimate) - India,” The World Bank. <https://data.worldbank.org/indicator/>
- Think Global Health. “India’s unjust health-care system”. <https://www.thinkglobalhealth.org/article/india-unjust-health-care-system>
- [g/article/caste-out](https://timesofindia.indiatimes.com/india/ncw-launches-whatsapp-number-to-report-domestic-violence-during-lockdown/articleshow/75082561.cms) [di akses pada 29 Juni 2025]
- Times of India, NCW Launches Whatsapp Number To Report Domestic Violence During Lockdown. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/ncw-launches-whatsapp-number-to-report-domestic-violence-during-lockdown/articleshow/75082561.cms> [di akses pada 29 Juni 2025]
- UN Women Asia and The pacific. “Gender Budgeting Responsive” <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/india/national-planning-and-budgeting/2/gender-responsive-budgeting> [di akses pada 09 Mei 2025]
- UN Women Asia-Pacific. Annual Report 2020-2021.
- UN Women, “In Historic Move, UN Creates Single Entity to Promote Women’s Empowerment” UN Women, <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2010/7/in-historic-move-un-creates-single-entity-to-promote-womens-empowerment> [di akses pada 08 September 2024]
- UN Women. 2020. “Types of violence against women and girls”. <https://africa.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence-1> [di akses pada 01 September 2024/]
- UN Women. 2021. “Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19” <https://data.unwomen.org/public>

- ations/vaw-rga [di akses pada 16 Maret 2025] National Crime Bureau, 2021. "Crime in India 2021: Statistics Government of India. <https://ruralindiaonline.org/hilibrary/resource/crime-in-india-2020-volume-i/> [di akses pada 16 Maret 2025]
- UN Women. 2021. "The Shadow Pandemic: Violence against women during COVID-19" [https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-](https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19) [response/violence-against-women-during-covid-19](https://www.unwomen.org/en/news/stories/explainer/2023/11/what-is-gender-responsive-budgeting) [di akses pada 01 September 2024]
- UN Women. 2023. "What is gender-responsive budgeting?" <https://www.unwomen.org/en/news/stories/explainer/2023/11/what-is-gender-responsive-budgeting> [di akses pada 22 April 2025]
- Welliswanti Sunardi. 2022. "Upaya UN Women (United Nations Women) dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di India". JOM FISIP, Vol. 9: Edisi II Juli.